

ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BANDARA JENDERAL BESAR SOEDIRMAN DI KABUPATEN PURBALINGGA

Author:

¹Marthalina, ²Syaiful Hukamak Ichsan

Affiliation:

¹Institut Pemerintahan Dalam Negeri, ²Pemerintah Kabupaten Purbalingga

Email:

¹marthalina88@gmail.com, ²ukauka2424@gmail.com

*Corresponding author

Marthalina

Fakultas Manajemen Pemerintahan

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

marthalina88@gmail.com

Received: Februari 10, 2022

Revised: March 20, 2022

Accepted: April 5, 2022

Available Online: June 30, 2022

Abstrak

Kebijakan pembangunan bandara JB Soedirman menjadi urgensi bagi masyarakat Jawa Tengah yang diharapkan membawa dampak positif dan perubahan bagi masyarakat sekitar sesuai dengan tujuan pembangunan untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, kehidupan sosial masyarakat dan infrastruktur wilayah. Pembangunan ini membutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Penelitian ini akan mendeskripsikan dampak kebijakan pembangunan bandara JB Soedirman dari sector ekonomi, angka kemiskinan dan pariwisata bagi masyarakat Kabupaten Purbalingga dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif induktif untuk melihat fakta dan data yang bersifat khusus untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan pembangunan bandara JB Soedirman membawa dampak terhadap ekonomi, angka kemiskinan dan pariwisata di Kabupaten Purbalingga. Perubahan terjadi pada aspek kewilayahan daerah yang secara bertahap menjadi kawasan padat penduduk sejak dimulainya pengoperasian bandara sebagai konsekuensi pembangunan infrastruktur baru. Di sisi lain juga terdapat dampak negatif pembangunan bandara JB Soedirman terhadap aspek sosial masyarakat yang mengalami pertukaran budaya dari kota ke desa. Pandemi covid 19 masih mewarnai pembangunan dan pemanfaatan bandara JB Soedirman yang mengakibatkan beberapa aspek masih belum bisa dimanfaatkan secara optimal. Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah melakukan edukasi peluang usaha, optimalisasi sumber daya masyarakat dan perlindungan hak ganti rugi lahan bagi masyarakat terdampak pembangunan bandara JB Soedirman yang berjalan dengan baik tanpa adanya konflik.

Kata kunci : dampak, kebijakan, pembangunan

Abstract

The JB Sudirman airport development policy becomes an urgency for the people of Central Java which is expected to bring positive impacts and changes to the surrounding community in accordance with development goals to encourage economic growth and development, social life of the community and regional infrastructure. This development requires good cooperation between the government, the private sector and the community. This study will describe the impact of the JB Sudirman airport development policy from the economic sector, poverty rate and tourism for the people of Purbalingga

Regency by using qualitative approaches and inductive descriptive methods to see facts and specific data to get general conclusions. Data was collected by observation, interviews, and documentation. The results of the study show that the JB Sudirman airport development policy has an impact on the economy, poverty rate and tourism in Purbalingga Regency. Changes occurred in the territorial aspect of the area which gradually became a densely populated area since the start of airport operations as a consequence of the development of new infrastructure. On the other hand, there is also a negative impact of the construction of the JB Sudirman airport on the social aspects of the community who experience cultural exchange from the city to the village. The COVID-19 pandemic is still coloring the development and utilization of the JB Sudirman airport which results in several aspects that cannot be utilized optimally. The Purbalingga Regency Government has conducted education on business opportunities, optimizing community resources and protecting land compensation rights for communities affected by the construction of the JB Sudirman airport which went well without any conflict.

Keywords: *impact, policy, development*

PENDAHULUAN

Pembangunan ditujukan untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik sesuai dengan perencanaan (Komunikasi et al., 2015). Dari sudut pandang penyelenggara pembangunan, tujuan pembangunan dianggap tepat dan layak jika memiliki beberapa dampak dan berbagai perubahan akibat dari aktivitas yang bersifat alamiah bagi kepentingan masyarakat (Soemarwoto, 1989). Pembangunan bandara sebagai tempat kegiatan yang membawa perubahan penting dan mempengaruhi kehidupan masyarakat sekitar sesuai dengan tujuan dari pembangunan yaitu untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, kehidupan sosial masyarakat setempat dan infrastruktur wilayah (Susanto, 2020).

Pembangunan membawa berbagai dampak yang mempengaruhi lingkungan, sosial, ekonomi dan aspek kewilayahan. Dampak kegiatan pembangunan dapat berupa dampak positif atau negative, langsung maupun tidak langsung. Pada bulan Juni 2021 bandara JB Soedirman resmi digunakan untuk umum dan mulai beroperasi komersil dengan daya tampung maksimal hingga 13.701 penumpang dan dirancang mampu melayani 3.000 penumpang per hari dengan pilihan 40 penerbangan domestik. Proyek pembangunan bandara JB Soedirman dimulai tahun 2018 yang dulunya merupakan pangkalan udara militer milik TNI Angkatan Udara. Pembangunan bandara JB Soedirman diharapkan berdampak besar terhadap masyarakat di Kecamatan Bukateja sebagai kecamatan terpadat jumlah penduduk di Kabupaten Purbalingga yang berjumlah 79.441 penduduk (Pembangunan & Purbalingga, 2021)

Tabel 1. Data Demografis

| Data Jumlah Mata Pencapaian Penduduk Kecamatan Bukateja | | Indeks Pembangunan Manusia di Eks Karesidenan Banyumas | |
|---|--------|--|--------------|
| Mata Pencapaian Penduduk | Jumlah | Eks Karesidenan Banyumas | IPM |
| Belum / Tidak Bekerja | 18 686 | Cilacap | 70,00 |
| Karyawan Swasta | 11 297 | Banyumas | 72,00 |
| Petani / Berkebun | 10 777 | Purbalingga | 69,00 |
| Lain-lain | 37 025 | Banjarnegara | 67,50 |
| Jumlah | 77 789 | Kebumen | 69,8 |
| Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2019 | | Sumber : BPS, Kab. Purbalingga, 2021 | |

Mayoritas penduduk di Kecamatan Bukateja sebelum pembangunan bandara JB Soedirman adalah mengelola ladang persawahan. Mata pencaharian yang cenderung masih sederhana dengan pola pikir agrarismenjadi salah satu penyebab mengapa tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Purbalingga masih rendah. Hal ini mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga untuk fokus terhadap pemanfaatan pembangunan bandara JB Soedirman untuk memajukan kesejahteraan daerah dengan mempertimbangkan perubahan sosial masyarakat.

Pada beberapa penelitian sebelumnya telah banyak dibahas tentang analisis dampak pembangunan beberapa bandara di Indonesia, seperti pembangunan Yogyakarta International Airport yang telah memberikan dampak positif maupun negatif terhadap sosial ekonomi masyarakat sekitar yang ditandai dengan bertumbuhnya kegiatan ekonomi seperti restoran, hotel, perumahan, bisnis catering, kos-kosan dan kontrakan. Akan tetapi dampak ekonomi ini masih belum banyak dirasakan oleh sebagian petani yang masih memiliki pola pikir agraris sehingga sulit untuk berpindah ke pola pikir industri (Ditinjau et al., 2022) sedangkan dampak negatif dari aspek sosial adalah terjadinya pertukaran budaya dan kepadatan wilayah sebagai konsekuensi dari pembangunan infrastruktur (Susanto, 2020). Pembangunan Bandara Kertajati juga membawa dampak positif bagi kinerja pembangunan ekonomi, industri pengolahan dan konstruksi dengan datangnya para investor untuk mendirikan pabrik di Majalengka. Dampak negatifnya adalah berkurangnya lahan pertanian di Kabupaten Majalengka (Jimika, 2019). Pembangunan Bandara Kualanamu juga berdampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Perubahan fungsi lahan pertanian dan perkebunan menjadi jalan raya, perkantoran dan perumahan mengakibatkan kenaikan harga tanah di Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang (Sharfina, 2014). Hal yang sama juga terjadi pada kenaikan harga tanah di jalur Bandar Internasional Lombok serta terjadinya perubahan makna terhadap nilai tanah dari yang semula bersifat sosial menjadi bersifat ekonomi. (Hartanto, 2012). Kebijakan pembangunan

daerah tentu akan menimbulkan beberapa permasalahan seperti konflik, sengketa lahan, perubahan sosial, ataupun beberapa permasalahan lainnya yang disebabkan oleh adanya alih fungsi lahan pertanian sebagai pembangunan bandara (Sopanudin, 2016). Penelitian ini akan membahas dampak pembangunan bandara JB Soedirman ditinjau dari analisis kebijakan yang masih belum dibahas dalam penelitian sebelumnya. Terlepas dari adanya dampak positif maupun negatif, pembangunan bandara JB Soedirman diharapkan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat lokal dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Keberadaan bandara JB Soedirman diharapkan dapat membawa kemajuan serta kemudahan bagi masyarakat Purbalingga dan sekitarnya, sedangkan bagi pengusaha yang ingin membangun bisnisnya di Kabupaten Purbalingga ataupun Provinsi Jawa Tengah keberadaan bandara JB Soedirman diharapkan dapat memudahkan dan menghemat waktu bisnis. Pembangunan bandara JB Soedirman adalah momentum bagi pemerintah daerah Kabupaten Purbalingga untuk menyejahterakan masyarakat sekaligus peluang membangun kerjasama dengan swasta. Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang ada di lapangan, penelitian ini akan membahas bagaimana dampak pembangunan bandara JB Soedirman dari aspek ekonomi, angka kemiskinan dan pariwisata.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang dilaksanakan secara langsung untuk mencari data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyelesaian masalah penelitian (Bhattacharjee, 2012). Penelitian menggunakan pendekatan induktif untuk melihat fakta dan data yang bersifat khusus untuk penarikan kesimpulan yang sifatnya umum dengan menggunakan hukum dan teori. Penelitian ini menggunakan peneliti sebagai instrumen kunci untuk mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi (J. W. Creswell, 2014) yang didukung dengan alat bantu buku literatur, kamera, alat tulis, *handphone*, serta laptop untuk mempermudah proses pengumpulan data (J. Creswell, 2018).

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi di Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan KB Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kantor Kecamatan Bukateja, Kecamatan Bukateja dan Desa Wirasaba. Dilanjutkan dengan kegiatan wawancara semiterstruktur yang bertujuan menemukan permasalahan secara lebih terbuka dengan menggunakan pedoman wawancara yang dapat berkembang di lapangan terhadap beberapa informan kunci seperti Kepala Dinas Sosial, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Kepala Seksi Pengembangan Potensi Sosial, Camat Bukateja, Warga Kecamatan Bukateja dan masyarakat Kabupaten Purbalingga yang total keseluruhan informan berjumlah 17 orang serta

diakhiri dengan kegiatan dokumentasi yang berkaitan dengan fokus penelitian berupa catatan, transkrip dan agenda yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga, Kantor Kecamatan Bukateja maupun instansi lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan. Dokumen lain yang dibutuhkan dalam penelitian ini bersumber dari BPS Kabupaten Purbalingga dan jurnal-jurnal yang mendukung penelitian. Teknik analisis data hasil penelitian dilakukan dengan rangkaian kegiatan berupa :1). reduksi data dengan merangkum, memilih dan memilah hal pokok dan penting sesuai dengan kebutuhan penelitian, 2). penyajian data dan informasi untuk dijadikan sebagai kesimpulan dan pengambilan keputusan, 3) penarikan kesimpulan berdasarkan bukti-bukti pendukung yang sudah dinyatakan valid.

HASIL PENELITIAN

Pembangunan bandara JB Soedirman dimulai sejak 2019 yang dibarengi oleh kondisi pandemi covid 19. Meskipun demikian bandara JB Soedirman diharapkan tetap mampu menumbuhkan ekonomi Kabupaten Purbalingga dan wilayah tetangga seperti Banyumas, Cilacap, Banjarnegara, Wonosobo, dan Kebumen. Bandara JB Soedirman diharapkan mampu meningkatkan aksesibilitas berupa mobilitas orang, barang dan logistik untuk pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas, Purbalingga, dan Pemerintah Provinsi Jateng telah bekerjasama membangun jalan penghubung mulai dari Kalibagor, Kota Purwokerto sampai Jembatan Linggamas menuju bandara JB Soedirman.

Ada empat jenis dampak dari sebuah pembangunan, **pertama**, dampak positif, yaitu dampak yang dipandang baik oleh penyelenggara pembangunan dan pemangku kepentingan lainnya. **Kedua**, dampak negatif, yaitu dampak yang tidak dipandang baik oleh penyelenggara pembangunan dan pemangku kepentingan lainnya. **Ketiga**, efek yang disadari, yaitu efek yang direncanakan, diketahui atau disadari oleh penyelenggara pembangunan (disebut fungsi manifes dalam sosiologi). **Keempat**, *unrealized effects*, yaitu efek yang tidak direncanakan oleh penyelenggara pembangunan, dimana efek tersebut tidak diketahui atau disadari (disebut fungsi laten dalam sosiologi). Diperlukan untuk menemukan efek potensial. Dengan kata lain, ada realitas sosial di balik realitas sosial itu sendiri (Afrizal, 2006).

Pembangunan akan mempengaruhi perubahan sosial dan ekonomi masyarakat termasuk perubahan nilai, sikap, dan pola perilaku dalam kelompok masyarakat (Djazifah, 2012). Dampak sosial adalah suatu bentuk dampak atau pengaruh yang terjadi dalam masyarakat karena suatu kejadian mempengaruhi orang lain dalam masyarakat atau masyarakat (Fardani, 2012), sedangkan dampak ekonomi terdiri dari dampak pendapatan, dampak kegiatan ekonomi, dan dampak pengeluaran (Dwi, 2015). Perkembangan JB Soedirman membawa

dampak positif berupa keuntungan finansial akibat pembangunan kontrakan, usaha kuliner, pembangunan fasilitas pendukung serta kenaikan harga tanah di sekitar bandara. Meskipun demikian dampak positif pembangunan tidak terlepas dari dampak negatif yang ditimbulkan seperti munculnya potensi tempat hiburan disekitar kawasan bandara, menurunnya mentalitas dan moral masyarakat, perubahan gaya hidup warga setempat.

Analisis Kebijakan

Kebijakan bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Kebijakan publik adalah tindakan, pernyataan dan tujuan pemerintah mengenai masalah tertentu, langkah-langkah yang telah atau gagal dilaksanakan (Wahab, 2012) maupun suatu program yang diproyeksikan dan berisikan tujuan-tujuan, nilai-nilai, praktek-praktek pelaksanaan kegiatan (Luankali, 2007). Kebijakan merupakan rangkaian kegiatan yang memiliki tujuan tertentu dan diselenggarakan oleh seorang atau sekelompok yang berhubungan dengan suatu permasalahan yang menjadi perhatian (Tachjan, 2006).

Penelitian ini menggunakan teori dari Van Meter dan Van Horn (1975) mengenai implementasi kebijakan yang dapat diukur melalui model implementasi kebijakan yang memiliki enam indikator yaitu 1) standar dan sasaran kebijakan, 2) sumber daya 3) karakteristik organisasi pelaksana 4) komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana 5) sikap para pelaksana 6) lingkungan sosial, ekonomi, dan politik (Fauziyah & Arif, 2021) sebagai berikut :

1. Kejelasan standar dan sasaran implementasi kebijakan pembangunan

Pembangunan bandara JB Soedirman telah menyesuaikan dengan regulasi Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara serta Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan. Namun, hasil penelitian ditemukan implementasi kebijakan pembangunan bandara JB Soedirman belum memenuhi standar fasilitas penunjang menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 yang didalamnya mengatur tentang rencana induk bandar udara berlaku selama 20 tahun yang paling sedikit memuat prakiraan permintaan kebutuhan pelayanan penumpang dan kargo serta memenuhi kebutuhan fasilitas penerbangan yang harus menyediakan fasilitas yang secara langsung dan tidak langsung menunjang kegiatan bandar udara dan memberikan nilai tambah secara ekonomis seperti fasilitas perbengkelan pesawat udara, fasilitas pergudangan, penginapan atau hotel, toko, restoran, dan lapangan golf.

Hal ini terjadi karena pandemi covid 19 sehingga terjadi keterlambatan pembangunan bandara JB Soedirman dari target awal. Lokasi bandara JB Soedirman di Kabupaten

Purbalingga juga dinilai oleh sebagian masyarakat terlalu dekat dengan Bandara Tunggul Wulung di Cilacap yang hanya sekitar 62 kilometer dan adanya pilihan bandara lain yang sudah beroperasi di Jawa Tengah seperti Bandara Internasional Adi Soemarmo di Boyolali, Bandara Dewandaru di Jepara, Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani di Semarang dan Bandara Ngloram di Blora. Meskipun pembangunan fisik bandara belum mampu memenuhi standar yang ditetapkan regulasi, namun disisi lain sasaran kebijakan pembangunan bandara JB Soedirman yang dibangun oleh PT Angkasa Pura II dengan nilai investasi sebesar Rp500 miliar dengan nilai kontrak pembangunan sebesar Rp245,83 miliar (Wahyudi, 2021) masih dipandang sebagai langkah optimis untuk menumbuhkan ekonomi di Kabupaten Purbalingga dan kawasan sekitarnya seperti Banyumas, Cilacap, Banjarnegara, Wonosobo, dan Kebumen. Pembangunan ini diharapkan akan meningkatkan mobilitas orang, barang dan logistik yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi pada wilayah di Jawa Tengah bagian selatan.

2. Sumber daya dalam implementasi kebijakan pembangunan

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya manusia dan dukungan non manusia (Subarsono, 2011). Dukungan sumber daya manusia terdiri atas kualitas maupun kuantitas yang berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalisme dan kompetensi di bidangnya. Sumber daya manusia mencakup yang ada di Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan KB Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemerintah Kecamatan Bukateja dan masyarakat Kabupaten Purbalingga. Kemampuan pegawai Dinas dan Kecamatan Bukateja dalam menyelesaikan tugas dapat dikatakan sudah baik karena merupakan aparatur yang ahli dibidangnya. Namun dari segi kuantitas aparatur masih diperlukan penambahan agar sumber daya manusia dapat mendukung keberhasilan kebijakan (Hasibuan, 2016). Realisasi program pembangunan bandara juga telah menggunakan warga sekitar lokasi untuk menjadi pekerja non-ahli seperti kuli bangunan, tenaga keamanan dan kebersihan. Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah dilakukan penyuluhan untuk mempersiapkan masyarakat yang mampu menangkap peluang dan adaptif terhadap perubahan.

Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu juga mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Sekretaris Umum PT Angkasa Pura II Agus Heriadi mengatakan anggaran yang dibutuhkan untuk penyelesaian sekitar Rp 350 miliar dan masih ada kemungkinan menjadi Rp 400-500 miliar. Sedangkan menurut Pj Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi, Pemerintah Provinsi Jawa tengah dan Kabupaten Purbalingga telah

menyiapkan aksesibilitas bandara mulai dari lahan, pembangunan akses jalan dan perluasan jalur menuju bandara dengan total anggaran mencapai Rp 127 miliar (Humas, 2021).

3. Karakteristik organisasi pelaksana dalam implementasi kebijakan pembangunan

Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan KB Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga telah bersinergi dengan Pemerintah Kecamatan Bukateja. Program penyuluhan terhadap warga Desa Wirasaba telah membuahkan hasil yang positif yang ditandai dengan beralihnya mata pencaharian sebagian warga yang semula mayoritas pekerja ladang menjadi wirausaha.

Kebijakan perlu mempertimbangkan karakteristik aktor pelaksana meliputi: **pertama**, struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan yang dalam proses pelaksanaan kebijakan pembangunan bandara JB Soedirman tidak ditemukan adanya struktur birokrasi yang menjadi landasan pelaksanaan tugas masing-masing instansi pelaksana, namun para pelaksana kebijakan sudah mengetahui tugas dan fungsi masing-masing instansi. **Kedua**, standar atau peraturan pelaksanaan pada saat pembangunan bandara JB Soedirman yang menggunakan standar, mekanisme atau SOP (*Standard Operating Procedures*), sehingga penanggung jawab pelaksanaan kebijakan seperti PT Angkasa Pura II, Pemerintah Provinsi Jawa tengah dan Kabupaten Purbalingga dapat memahami dan memahami tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab masing-masing agar kegiatan dapat terkontrol secara sistematis (Taufiq, 2019). **Ketiga**, pola hubungan yang terjalin antara pelaksana kebijakan telah bersinergi untuk fokus terhadap pemberdayaan masyarakat dan peningkatan ekonomi.

4. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana dalam implementasi kebijakan pembangunan

Komunikasi dan kerjasama antar organisasi pelaksana kebijakan pembangunan bandara JB Soedirman telah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari beberapa kerjasama Pihak Angkasa Pura II, Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan KB Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga, pemerintah Kecamatan Bukateja dan pemerintah Desa Wirasaba terkait pemberdayaan masyarakat melalui rekrutmen tenaga kerja non ahli yang diperkerjakan tetap di Bandara JB Soedirman. Adanya kerjasama program penyuluhan bagi masyarakat Desa Wirasaba dengan perwakilan organisasi karang taruna Kecamatan Bukateja juga menghasilkan kegiatan bimbingan ekonomi kreatif dalam rangka merubah *mindset* masyarakat tentang mata pencaharian yang berkembang sesuai kebutuhan wilayah sekitar pembangunan bandara. Sinergitas komunikasi dengan perangkat

Desa wirasaba dalam penggunaan dana desa juga terus dioptimalkan untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pasca pembangunan (Prayoga et al., 2020).

5. Sikap para pelaksana dalam implemntasi kebijakan pembangunan

Sikap pelaksana kebijakan dalam hal ini pegawai Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga, Pemerintah Kecamatan Bukateja dan pemerintah Desa Wirasaba sebagai penggerak utama program pemberdayaan masyarakat Kabupaten Purbalingga sudah cukup baik. Hal ini dituturkan oleh Bapak Prisa selaku sekretaris Karang Taruna Kecamatan Bukateja yang menyampaikan bahwa aparat Pemerintah Kabupaten Purbalingga secara konsisten telah melakukan penyuluhan pemberdayaan masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap pemberian uang ganti lahan kepada masyarakat oleh pihak Angkasa Pura II sehingga berjalan lancar dan sesuai yang dijadwalkan. Pendampingan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dilaksanakan untuk meminimalisir konflik yang dapat dilakukan melalui pendekatan kepada masyarakat, membangun kerjasama dan kesepakatan (Ardhan, 2020). Akan tetapi dukungan pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat (Oroh, 2020) Desa Wirasaba belum sepenuhnya didukung oleh partisipasi masyarakat yang masih bersifat pasif atau hanya menunggu arahan pemerintah.

6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik dalam implementasi kebijakan pembangunan

Indeks kesejahteraan masyarakat Kecamatan Bukateja tahun 2020 masih tertinggal jika dibanding dengan kecamatan lainnya. Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga secara aktif bekerjasama dengan Pemerintah Kecamatan Bukateja dan organisasi Karang Taruna Kecamatan Bukateja untuk melakukan pendekatan terhadap masyarakat melalui program pemberdayaan dan pendampingan di masyarakat untuk meminimalisir gesekan atau salah informasi dalam pembangunan dan pemanfaatan kawasan bandara JB Soedirman.

Dampak Ekonomi

Pandemi covid 19 memberi dampak yang luar biasa terhadap kondisi perekonomian global, nasional, maupun regional (Susanto, 2020). Kinerja ekonomi dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga pada tahun 2021 membaik dengan capaian nilai 3,19% atau meningkat dari pertumbuhan ekonomi tahun 2020 yaitu -1,18%. Namun terdapat dua jenis lapangan usaha yang mengalami kontraksi paling besar yaitu sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, yaitu sebesar -98%. Selama tahun 2019 sampai tahun 2021 perekonomian Kabupaten Purbalingga didominasi oleh sektor industri pengolahan. Trennya memperlihatkan

pertumbuhan yang positif (Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga, 2021). Tahun 2019 kontribusi sektor industri pengolahan adalah sebesar 27,24 persen sedangkan pada tahun 2021 meningkat menjadi 28,07 persen. Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk Kabupaten Purbalingga tahun 2021 tercatat sebesar 900.102 rupiah sedangkan pengeluaran penduduk untuk komoditas bukan makanan lebih tinggi dibandingkan dengan pengeluaran penduduk untuk makanan. (Purbalingga, 2022).

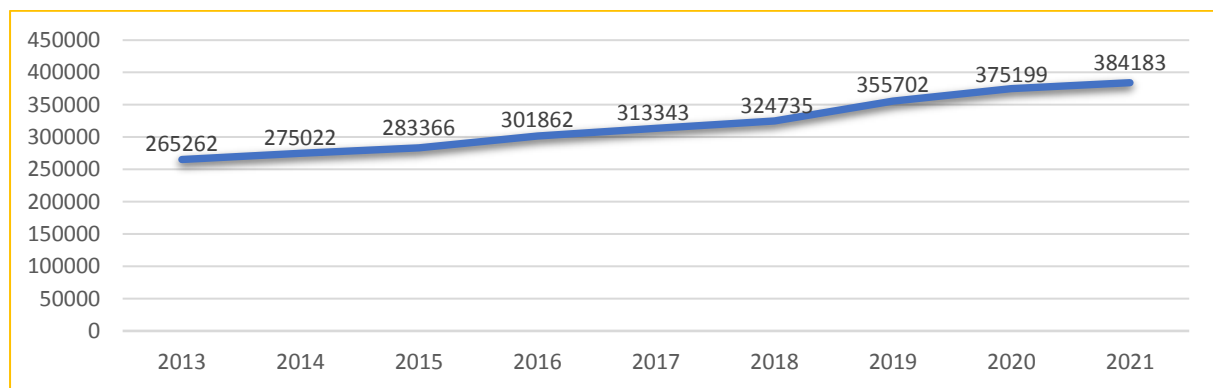
Kabupaten Purbalingga memiliki kondisi makro ekonomi meningkat yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi dilihat dari laju pertumbuhan (PDRB) atas dasar harga konstan tahun 2021. Data PDRB merupakan gambaran kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk melakukan proses produksi. Besaran PDRB suatu daerah bergantung pada faktor produksi daerah dan potensi sumber daya alamnya (Hartanto, 2012). Di sisi lain, besaran pendapatan suatu rumah tangga dapat mewakili kemakmuran suatu masyarakat. Akan tetapi data kedua tolak ukur ini sulit didapatkan secara akurat, sehingga penelitian ini menggunakan data pengeluaran rumah tangga yang terdiri dari makanan dan makanan lainnya dapat mewakili bagaimana penduduk membagi kebutuhan rumah tangganya sebagai acuan. Meskipun harga regional bervariasi akan tetapi nilai pengeluaran rumah tangga secara umum dapat menunjukkan perbedaan tingkat kesejahteraan penduduk dari perspektif ekonomi suatu daerah.

Jika dikaitkan dengan pembangunan bandara JB Soedirman yang sempat tidak beroperasi pada tahun 2021 lalu kembali dibuka pada tahun 2022, dampak ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Purbalingga khususnya masyarakat di Kecamatan Bukateja masih belum maksimal. Geliat ekonomi di sekitaran bandara JB Soedirman masih belum sepenuhnya meningkatkan pendapatan masyarakat karena penerbangan domestik yang masih terbatas ditambah situasi pasca pulih dari pandemi covid 19.

Dampak yang dirasakan oleh warga Desa Bukateja selama kurang lebih hampir 1 tahun pembukaan bandara JB Soedirman menurut masyarakat yaitu Bapak Sunaryo yang bekerja sebagai pedagang keliling adalah tumbuhnya usaha mikro dan usaha kecil masyarakat di sekitaran bandara JB Soedirman seperti warung makan, warung kopi, toko kelontong, toko pulsa dan lain sebagainya yang merupakan lapangan kerja baru. Pembangunan bandara JB Soedirman juga telah banyak tenaga non ahli dari masyarakat sekitar. PT Angkasa Pura II selaku pengelola bandara JB Soedirman sejak awal sudah melakukan fungsi penyertaan putra daerah yaitu memberdayakan warga sekitar untuk menjadi tenaga kerja non ahli seperti bagian *cleaning service* dan *security* sedangkan untuk tenaga ahli seperti bagian maintenance, AVSEC, maupun yang lain bersifat teknis masih menggunakan tenaga kerja saluran dari pusat.

Dampak Terhadap Kemiskinan

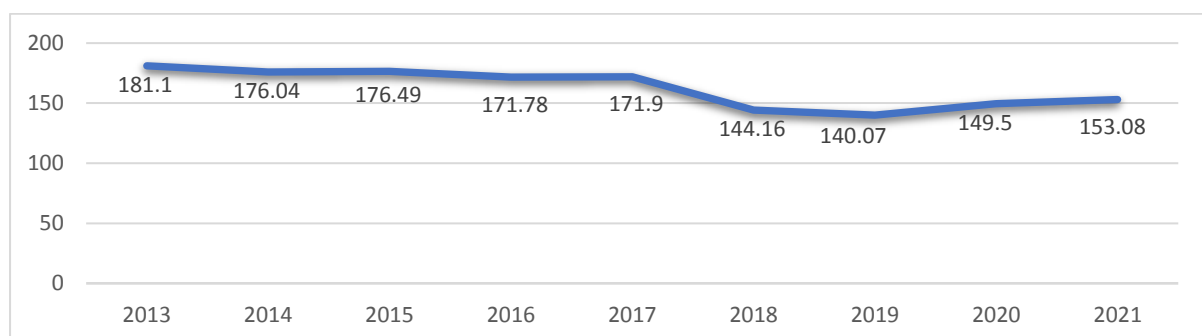
Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2021 tercatat sekitar 153,1 ribu orang (16,24%) dengan garis kemiskinan sebesar 384.183 rupiah perkapita perbulan. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang berjumlah 149,5 ribu orang (15,9%) maka jumlah penduduk miskin di Kabupaten Purbalingga meningkat sekitar 2,4 % (Purbalingga, 2022).



Sumber: BPS Purbalingga 2021

Gambar 1. Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) Kabupaten Purbalingga

Berdasarkan data garis kemiskinan yang dihitung berdasarkan jumlah rupiah minimum yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan minimum kebutuhan pokok berupa makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan (Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga, 2021), sejak tahun 2019 hingga 2021 terus mengalami peningkatan dan hal ini sejalan dengan data jumlah dan persentase penduduk miskin selama tahun 2019 hingga 2021 yang juga mengalami peningkatan.

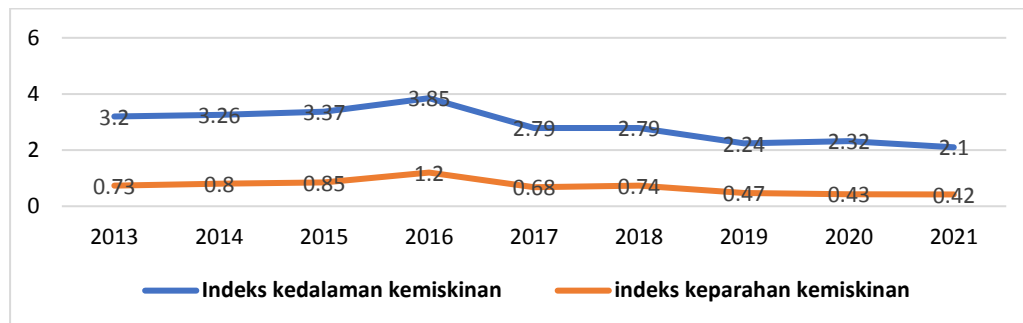


Sumber: BPS Purbalingga 2021

Gambar 2. Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 s.d 2021

Kemiskinan tidak hanya dilihat dari persentase dan jumlah total penduduk miskin suatu daerah, akan tetapi terdapat dimensi lain yang harus diperhatikan yaitu tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Oleh karena itu, kebijakan penanggulangan kemiskinan yang

dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Purbalingga seharusnya memperhatikan bagaimana mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan karena nilai indeks kedalaman kemiskinan merupakan cerminan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.



Sumber: BPS Purbalingga 2021

Gambar 3. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahannya Kemiskinan Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 s.d 2021

Berdasarkan data indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Purbalingga terhadap garis kemiskinan pada tahun 2019 sempat mengalami penurunan pada angka 2,24 akan tetapi pada tahun 2020 kembali naik menjadi 2,32 dan turun menjadi di tahun 2021 sebesar 2,1. Pandemi covid 19 dianggap paling mempengaruhi perubahan rata-rata garis kemiskinan yang turun naik dalam tiga tahun terakhir. Begitu halnya dengan indeks keparahan kemiskinan yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Secara konstan sejak tahun 2019, 2020 hingga 2021 mengalami penurunan. Angka ini menunjukkan semakin rendah pengeluaran di antara penduduk miskin akibat dari pandemi covid 19 yang juga menurunkan daya beli masyarakat.

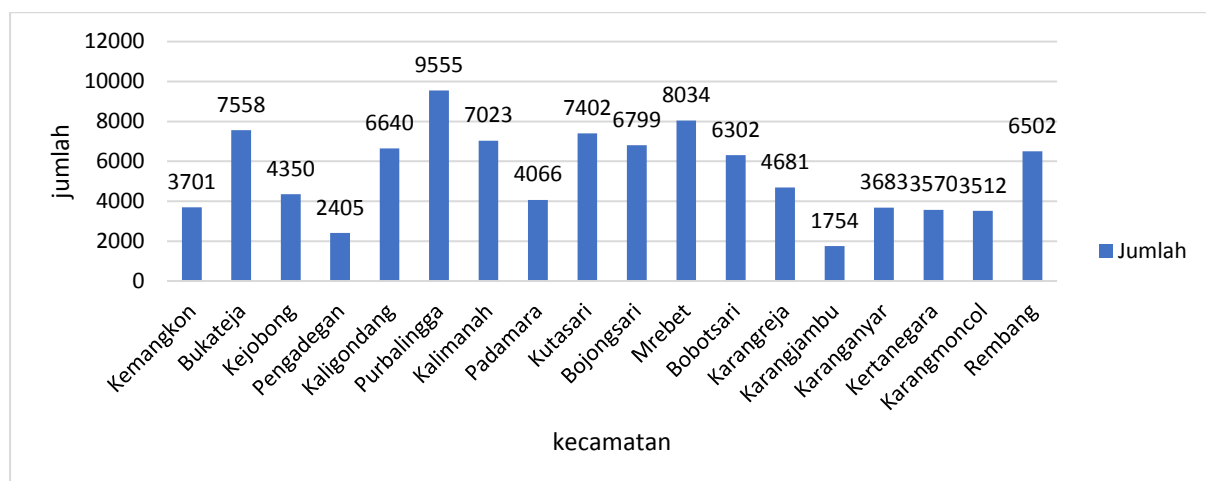


Gambar 4. Karakteristik Penduduk Miskin Kabupaten Purbalingga Tahun 2021

Penduduk miskin kelompok umur 7 - 12 tahun yang bersekolah tercatat 100% Sedangkan penduduk miskin kelompok umur 13 – 15 tahun yang masih sekolah tercatat 85%.

Hal ini berarti masih terdapat 15 persen anak yang berusia 13-15 tahun yang seharusnya sekolah di SMP/ sederajat tetapi tidak sekolah. Bila dilihat angka melek huruf penduduk miskin, masih terdapat 1,4% penduduk miskin berusia 15-55 tahun yang buta huruf. Sementara itu, persentase pengeluaran per kapita penduduk miskin untuk makanan mencapai 61,75% yang berarti lebih dari separuh penghasilan penduduk miskin digunakan untuk memenuhi kebutuhan makan.

Tercatat 89,35% penduduk miskin usia 15 tahun keatas hanya lulusan SMP ke bawah. Dilihat dari status bekerja, penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang tidak bekerja mencapai 47,12% sedangkan yang bekerja di sektor informal dan formal masing-masing tercatat 24,27% dan 28,6%. Dilihat dari sektor bekerja, dari penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang bekerja, tercatat 12,39% bekerja di sektor pertanian dan 40,49% bekerja di sektor nonpertanian seperti buruh industri rumah tangga, buruh penggilingan padi, buruh perkebunan, buruh bangunan, dan aktivitas serabutan lainnya.



Gambar 5. Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menurut kecamatan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021

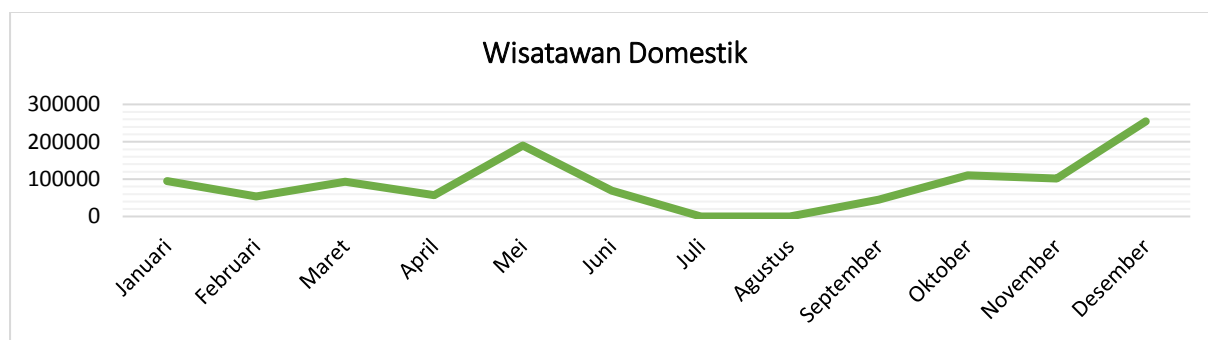
Berdasarkan data jumlah UMKM tahun 2021 di Kabupaten Purbalingga, kecamatan Bukateja yang merupakan wilayah dibangunnya bandara JB Soedirman merupakan kecamatan urutan ketiga dengan jumlah UMKM terbanyak di Kabupaten Purbalingga. Data ini dapat diartikan bahwa geliat ekonomi disaat pandemi covid 19 masih tetap ada di Kabupaten Purbalingga meskipun tidak cukup besar memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Secara umum pembangunan bandara JB Soedirman selama 3 tahun terakhir belum berdampak signifikan terhadap perekonomian Kabupaten Purbalingga, karena angka kemiskinan justru naik. Di sisi lain tingkat pengangguran di Kabupaten Purbalingga pada Agustus 2021 tercatat 30.450 jiwa atau sekitar 6,05 persen yang berarti bahwa dari 100

orang angkatan kerja terdapat sekitar 6 orang yang merupakan pengangguran (tidak bekerja, sedang mempersiapkan usaha, atau mencari pekerjaan). TPT di tahun 2021 sedikit menurun dibandingkan tahun 2020 di mana pada tahun 2020 persentasenya mencapai 6,10 persen (Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga, 2021).

Berdasarkan wawancara dengan Camat Bukateja ada beberapa hal positif yang bisa dirasakan warga. **Pertama**, sebagian penduduk yang menerima ganti rugi lahan telah melakukan investasi di tingkat lokal dengan membeli tanah lain atau membangun rumah di lokasi relokasi pembangunan bandara yang mengakibatkan kenaikan harga tanah. **Kedua**, meningkatnya pembangunan kawasan pemukiman, apartemen dan kos-kosan di sekitar bandara. **Ketiga**, meningkatnya pertumbuhan restoran, katering dan toko kelontong di dalam dan di luar area bandara.

Dampak Pariwisata

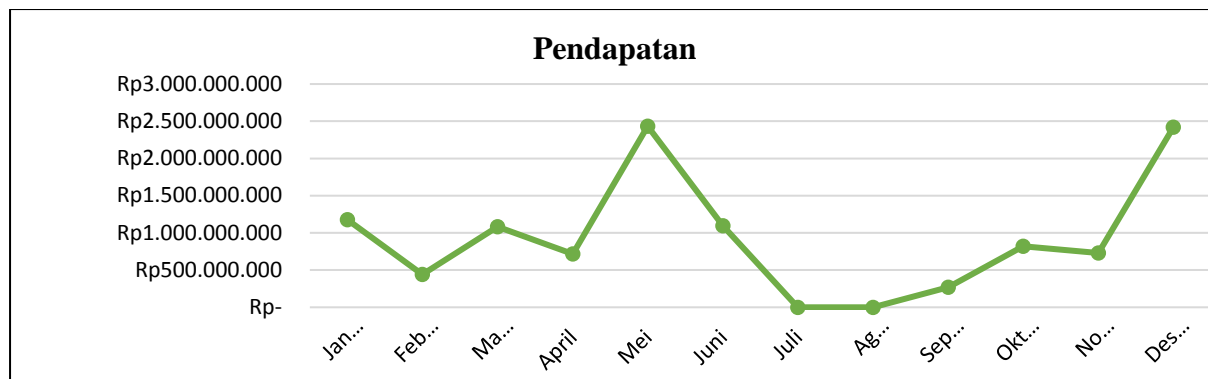
Pembangunan bandara JB Soedirman membawa dampak terhadap pembangunan kepariwisataan yang ditandai dengan meningkatnya kunjungan ke berbagai obyek wisata. Pada tahun 2021 jumlah pengunjung sempat menurun akibat pandemi covid 19. Tercatat jumlah pengunjung di berbagai objek wisata Kabupaten Purbalingga sebanyak 1.068.495 orang dan memberikan pemasukan sebesar 11 milyar rupiah.



Sumber : BPS Kabupaten Purbalingga, 2021

Gambar 6. Jumlah Wisatawan Domestik dari Obyek Wisata Menurut Bulan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021

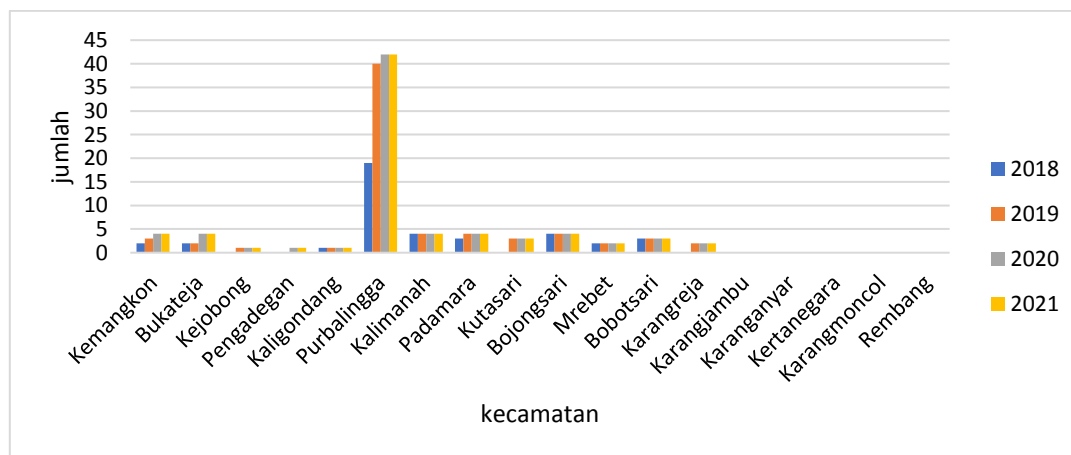
Pada tahun 2022 kondisi pariwisata di Kabupaten Purbalingga mulai menggeliat. Kunjungan ke objek wisata yang dikelola oleh BUMD Purbalingga mengalami peningkatan dari target 35 ribu kunjungan bahkan melebihi target dengan capaian 84 ribu kunjungan seiring dengan menurunnya kasus covid-19 di era *new normal*, pelonggaran aturan tidak adanya tes PCR dan swab antigen bagi yang telah menjalani vaksin lengkap dan promosi pariwisata.



Sumber : BPS Kabupaten Purbalingga, 2021

Gambar 7. Jumlah Pendapatan Dari Objek Wisata Menurut Bulan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021

Saat ini Kabupaten Purbalingga memiliki 75 buah rumah makan atau restoran yang menjadi sarana penunjang sektor pariwisata.



Sumber : BPS Kabupaten Purbalingga, 2021

Gambar 8. Jumlah Rumah Makan/Restoran Menurut Kecamatan di Kabupaten Purbalingga, 2018–2021

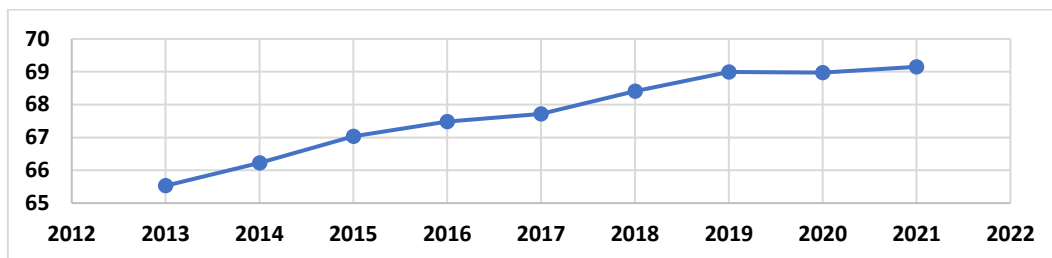
Terjadi pertumbuhan jumlah ketersediaan rumah makan atau restoran di Kabupaten Purbalingga. Pada tahun 2019 terdapat penambahan sebanyak 29 rumah makan/ restoran begitupun tahun 2020 juga bertambah sebanyak 6 buah. Berbeda dengan tahun 2021 yang justru tidak terjadi penambahan. Di sisi lain jumlah rumah makan/restoran di Kecamatan Bukateja sebagai wilayah didirikannya bandara JB Soedirman masih sangat minim yang hanya berjumlah 4 buah. Sebagai wilayah strategis dengan jumlah kepadatan penduduk tertinggi dan lokasi berdirinya bandara JB Soedirman seharusnya di Kecamatan Bukateja dapat bertumbuh lebih maksimal dibanding daerah yang lainnya.

Akses transportasi darat juga menjadi fokus perbaikan oleh Pemda Kabupaten Purbalingga. Pengembangan terminal Bobotsari sebagai tipe A telah dilengkapi dengan

fasilitas ruang tunggu penumpang yang dibangun dua lantai yang dalam perencanaannya akan dilengkapi dengan kios-kios yang berjumlah 89 kios dan pada tahun 2022 baru terselesaikan sebanyak 40 kios. Pemda Kabupaten Banyumas, Purbalingga, dan Pemerintah Provinsi Jateng juga telah bekerjasama membangun jalan penghubung mulai dari Kalibagor, Kota Purwokerto sampai Jembatan Linggamas menuju Bandara JB Soedirman.

Pembangunan Manusia

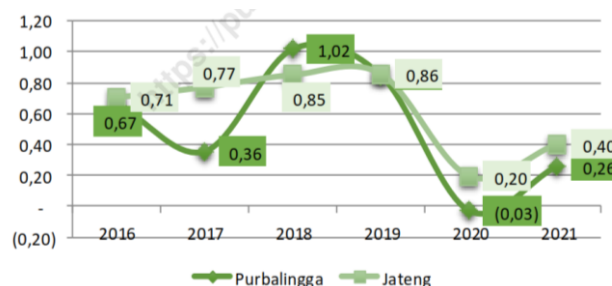
Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan indikator yang mengukur tiga dimensi pembangunan manusia yaitu lama hidup, tingkat pendidikan, serta akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak sehingga indeks pembangunan manusia merupakan cerminan kemampuan dasar penduduk di suatu daerah.



Sumber: BPS Purbalingga 2021

Gambar 9. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 sd 2022

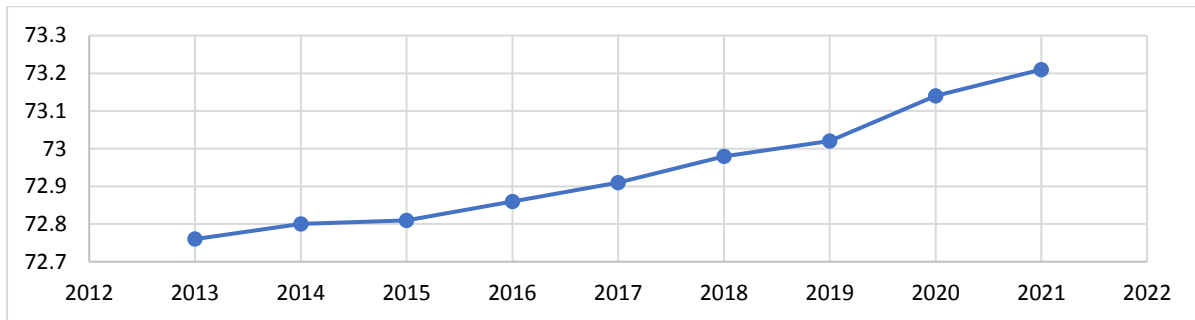
Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2020 sebesar 71,94 atau tumbuh 0,03 persen atau meningkat 0,02 poin dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Kenaikan yang sangat tipis ini memang tidak biasa, sebab pada tahun-tahun sebelumnya biasanya IPM meningkat sekitar 0,5 sampai 0,6. Pada tahun 2020 kenaikan IPM hampir flat atau tidak terjadi peningkatan. Salah satu penyebabnya karena adanya Covid-19 yang mulai melanda Indonesia sejak awal Maret 2020. Covid -19 ini menyebabkan banyak masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan.



Gambar 10. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Jawa Tengah dan Kab.Purbalingga Tahun 2016 s.d 2021

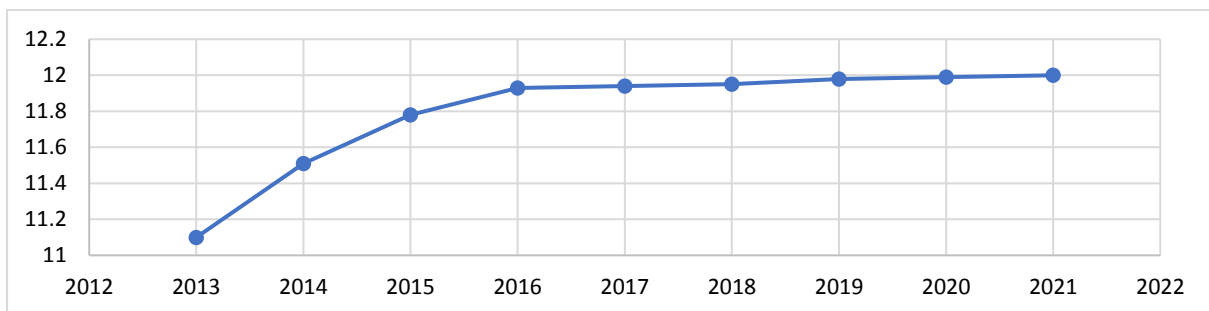
Indeks Pembangunan Manusia Purbalingga tahun 2021 mencapai 69,15. Dengan capaian IPM itu, Purbalingga berada pada posisi status pembangunan manusia kategori

‘sedang’. Capaian tersebut menempatkan Purbalingga pada posisi 29 dari 35 kabupaten/kota dalam pencapaian pembangunan manusia di Jawa Tengah. Capaian IPM Purbalingga masih berada di bawah Jawa Tengah dengan pertumbuhan pada tahun 2021 sebesar 0,26 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Pembangunan & Purbalingga, 2021).



Sumber: BPS Purbalingga 2021

Gambar 11. Usia Harapan Hidup Saat Lahir di Kab. Purbalingga Tahun 2012 s.d 2022



Sumber: BPS Purbalingga 2021

Gambar 12. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan

Tinggi rendahnya nilai pembangunan manusia tidak hanya ditentukan oleh beberapa komponen penyusun IPM (Uji, 2015), akan tetapi juga dipengaruhi oleh beberapa indikator seperti jumlah fasilitas pendidikan dan kesehatan, jumlah tenaga pendidikan dan kesehatan, kemudahan dalam mengakses layanan pendidikan dan kesehatan, serta kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengetahuan tentang kesehatan, pendidikan, kesempatan kerja dan distribusi pendapatan.

Secara umum pembangunan bandara JB Soedirman memiliki dampak secara tidak langsung terhadap meningkatnya IPM di Kabupaten Purbalingga. Terbukanya akses transportasi baik darat maupun udara secara prinsip juga membuka peluang kesempatan kerja, distribusi pendapatan dan akses informasi pariwisata bagi masyarakat di Kabupaten Purbalingga. Meskipun belum berdampak secara langsung akibat pandemi covid 19, harapannya pemanfaatan bandara JB Soedirman akan terus membawa warna baru bagi akses dan informasi masyarakat di Kabupaten Purbalingga.

PENUTUP

Pembangunan bandara JB Soedirman memberikan dampak bagi positif maupun negative terhadap masyarakat sekitar. Dampak positif pembangunan bandara JB Soedirman terlihat dari aspek ekonominya yang ditandai dengan bertumbuhnya kegiatan perekonomian, seperti pariwisata, penginapan dan kuliner meskipun masih belum signifikan karena masih terdampak pandemi covid 19. Disisi lain dampak negatif dari keberadaan JB Soedirman terjadi pada aspek sosial masyarakat yang mengalami “pertukaran” budaya dan terciptanya kepadatan permukiman sebagai konsekuensi dari pembangunan infrastruktur baru. Perubahan juga terjadi di Kecamatan Bukateja khususnya di Desa Wilasaba semula tidak terlalu padat saat ini secara bertahap menjadi ramai dengan tumbuhnya peningapan atau kos-kosan.

Kebijakan pemerintah untuk masyarakat Kecamatan Bukateja dianggap sudah tepat dengan menyelenggarakan kegiatan penyuluhan dan pendampingan oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan KB Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga yang bekerjasama dengan pemerintah Kecamatan Bukateja. Kegiatan ini dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Kegiatan penyuluhan bertujuan untuk mengedukasi warga terdampak pembangunan JB Soedirman agar dapat melihat peluang usaha serta memaksimalkan potensi warga dengan cara memberi bantuan. Sedangkan kegiatan perlindungan masyarakat dilakukan pada saat proses pembayaran uang ganti lahan oleh pihak bandara dalam hal ini PT Angkasa Pura II kepada masyarakat. Pendampingan ini dilaksanakan untuk meminimalisir konflik yang dapat dilakukan melalui pendekatan kepada masyarakat, membangun kerjasama dan kesepakatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. (2006). *Sosiologi Konflik Agraria; Protes-protes Agraria dalam Masyarakat Kontemporer*. Padang: Pers Universitas Andalas.
- Ardhan, D. K. dan F. M. (2020). Manajemen Penanganan Konflik Agraria di Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, XII(1), 31–41. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JAPD/article/view/1465/843>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga. (2021). *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Purbalingga 2020/2021*. 103.
- Creswell, J. (2018). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, Fifth Edition*.

- Creswell, J. W. (2014). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, Fourth Edition*.
- Ditinjau, Y., Perekonomian, D., Kecamatan, M., Kabupaten, T., Progo, K., Setiyaningrum, L., Sri, E., Sekolah, H., Teknologi, T., & Yogyakarta, K. (2022). *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal Analisis Dampak Pembangunan Bandara Internasional*. 4(5), 1334–1342.
- Djazifah, N. (2012). *Proses Perubahan Sosial Di Masyarakat*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Yogyakarta.
- Dwi P., Rahmat. (2015). *Dampak Sosial Ekonomi Dan Lingkungan Penambangan Batubara Ilegal Di Desa Tanjung Lalang Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim*. Jurusan Sosiologi, Fakultas Sosial Dan Ilmu Politik : Universitas Sriwijaya.
- Fardani, Andi. (2012). *Dampak Sosial Keberadaan Pt Vale Indonesia Tbk Terhadap Kehidupan Masyarakat (Studi Kasus Sorowako Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur)*. Universitas Hasanuddin: Jurusan Sosiologi FISIP.
- Fauziyah, W. E., & Arif, L. (2021). Model Implementasi Kebijakan Van Meter Dan Van Horn Dalam Tinjauan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan (Ring Road) Di Kabupaten Tuban. *Journal Publicuho*, 4(2), 672–691. <https://doi.org/10.35817/jpu.v4i2.18573>
- Hartanto, E. (2012). *Dampak pembangunan Bandara Internasional Lombok (BIL) terhadap nilai tanah di kabupaten Lombok Tengah / The impact of Lombok International Airport (LIA) development on the land val ... June*.
- Hasibuan, M. S., & Hasibuan, H. M. S. (2016). *Manajemen sumber daya manusia*. Bumi Aksara.
- Jimika, F. (2019). The Impact Of Kertajati Airport On Economic Structure Of Majalengka. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 3(1), 11–21.
- Komunikasi, J. I., Ilmu, F., Dan, S., Politik, I., & Diponegoro, U. (2015). *Manajemen Konflik dan Negosiasi Wajah Dalam Budaya Kolektivistik (Konflik Pembangunan Bandara di Kulon Progo)*. 1–11.
- Oroh, B. K. B. (2020). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Barat Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara Dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Ilmu Administrasi Pemerintah Daerah*, 12(2), 44–50.
- Pembangunan, A., & Purbalingga, M. (2021). *Katalog : 4101043.3303*.
- Prayoga, I. M. A. S., Mulyati, D., & Rowa, H. (2020). Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tulamben Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, Vol 12(1),

42–57.

- Purbalingga, P. K. (2022). Kabupaten Purbalingga Dalam Angka tahun 2022. *Dokumen*, <https://news.ge/anakliis-porti-aris-qveynis-momava>.
- Sharfina, S. (2014). DAMPAK PEMBANGUNAN BANDARA KUALANAMU TERHADAP NILAI TANAH (Studi Pada Kantor Kecamatan Beringin , Kabupaten Deli Serdang). *Perspektif*, 7(1), 271–290. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/perspektif/article/view/160>
- Soemarwoto, O. (1989). Analisis dampak lingkungan. Gadjah Mada University Press.
- Sopanudin, A. (2016). Konflik Lahan Pertanian dalam Pembangunan Bandara Internasional di Kulon Progo. *Jurnal Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta*, 2–18.
- Subarsono, A. G. (2012). *Analisis kebijakan publik: konsep, teori dan aplikasi*.
- Susanto, H. (2020). Analisis Dampak Sosial Ekonomi dalam Pembangunan Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) di Kabupaten Kulonprogo. *Majalah Ilmiah Bijak*, 17(1), 1–9. <https://doi.org/10.31334/bijak.v17i1.820>
- Taufiq, A. R. (2019). Penerapan Standar Operasional Prosedur (Sop) Dan Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit. *Jurnal Profita*, 12(1), 56. <https://doi.org/10.22441/profita.2019.v12.01.005>
- Uji, A. Y. T. (2015). Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam Pembangunan Bandara Swadaya Sangia Nibandera Kabupaten Kolaka Andi Yanti Tenri Uji Pemerintah Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, Indonesia. *Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik (JAKPP)*, 1(2), 169–180. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jakpp/article/view/1025>
- Wahab, S. A. (2021). *Analisis kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. Bumi Aksara.